

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Mulai Dicairkan



<https://kalselpos.com>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), memastikan setidaknya sebanyak 18.719 Kepala Keluarga (KK) terdampak Covid-19 di HSU akan menerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD). Hal tersebut disampaikan, Plt. Kepala DPMD HSU Rijali Hadi, melalui video pernyataan resmi di kantornya.

Ia mengatakan bahwa BLT-DD merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi dari adanya Pandemi Covid-19 khususnya di tingkat desa. Rizali menjelaskan bahwa di Kabupaten HSU terkait program BLT DD tersebut, sudah mulai berproses sejak bulan April kemarin.

Adapun data calon penerima BLT-DD yang didapat sampai saat ini sebanyak 18.719 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 214 desa di Kabupaten HSU.

Rijali mengharapkan, agar penyaluran BLT-DD dapat tersalurkan seluruhnya khusus di bulan Mei ini, sebagai BLT-DD bulan pertama yang akan disalurkan selama tiga bulan kedelapan.

“BLT-DD ini akan disalurkan kepada masyarakat Kabupaten HSU selama tiga bulan, kemungkinan bulan Mei, bulan Juni dan terakhir di bulan Juli dengan jumlah Rp 600ribu perbulan,” imbuhnya.

Sedangkan, ia menambahkan untuk penerima BLT di lima kelurahan akan dicover dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSU.

Untuk mekanisme pencairan dana BLT-DD tersebut, Rijali menyebutkan Pemkab HSU telah berkoordinasi dengan BPD Bank Kalimantan Selatan (Kalsel), sebagai tempat penyalurannya baik yang di Kabupaten maupun di Kecamatan.

Kemudian, di antara kriteria penerima BLT-DD adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian, atau mempunyai anggota keluarga yang sedang sakit kronis, serta tidak tercatat sebagai penerima PKH dan Bantuan Pangan Non tunai serta bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Sumber Berita:

<https://klikkalsel.com/>, *18.719 KK Terdampak Covid-19, Bakal Terima BLT Dana Desa*, Selasa, 12 Mei 2020.

<https://kalselpos.com/>, *BLT DD di HSU Mulai Dicairkan*, Kamis, 14 Mei 2020.

Catatan Berita:

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah

administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

➤ **Pengertian Dana Desa**

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Istilah dana desa sendiri pertama kali muncul secara resmi dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa sebagai satu dari tujuh sumber pendapatan desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

➤ **Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)**

Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan, pengutamakan penggunaan dana desa adalah dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19). sasaran penerima BLT DD sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah masyarakat miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bukan merupakan

penerima bantuan dari APBD atau APBN misalnya PKH, BPNT maupun Kartu Prakerja. Skema yang digunakan dalam BLT DD ini adalah setiap Desa wajib mengalokasikan BLT DD dengan besaran Rp600.000,00/KK. Bagi Desa yang tidak mengalokasikan, akan diberikan sanksi berupa penyaluran Dana Desa Tahap III akan dihentikan. Jangka waktu penyaluran BLT DD adalah tiga bulan dimulai dengan penyaluran tahap I pada awal bulan Mei 2020. Dalam penyaluran BLT DD, Kepala Desa merupakan penanggung jawab dalam penyalurannya.

Terkait pelaporan BLT DD, Kepala Desa wajib melaporkan rekap data penyaluran BLT DD, menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi penanggulangan COVID-19 setiap bulan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT DD sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD). Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan Inspektorat Kabupaten melakukan monitoring atas BLT DD yang direncanakan oleh desa beserta pelaksanaan penyalurannya.